

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PROFESIONALITAS PELAYANAN REJE KAMPUNG BAGI
MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA
KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN
ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Oleh :

RAHENDRA SALAM
NPM: 1303100136

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya, **RAHENDRA SALAM** NPM : 1303100136 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang- undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jilpakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini berserta nilai – nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesajanaan yang telah saya peroleh, serta pembatan dan penarikan ijazah sarjanaan dan transkip nilai yang telah saya terima.

Medan, 6 Agustus 2017

yang menyatakan

RAHENDRA SALAM

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN REJE KAMPUNG BAGI MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH

RAHENDRA SALAM
1303100136

Pemerintahan kampung merupakan penyelenggara pemerintahan yang dijalankan oleh unsur sarak opat dan pemerintahan kampung dalam mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati di dalam sistem pemerintahan NKRI di kabupaten Aceh Tengah. Sarak opat adalah suatu istilah dalam persiapan keputusan yang meliputi empat unsur yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue, Rakyat Genap Mupakat*. Dengan adanya 4 unsur pemerintahan maka pelaksanaan pemerintahan kampung dapat berjalan efektif dan efisien serta profesional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Pelayanan Reje Kampung Bagi Masyarakat Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif yaitu data yang di analisis dengan teknik diskriptif yang menggambarkan kenyataan atau kejadian apa adanya di lapangan yang sesuai dengan hasil sebenarnya. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Pelayanan Reje Kampung Bagi Masyarakat sudah terlaksana dengan adanya tugas, fungsi, perubahan keputusan program – program dan penganturan sarana prasarana penunjang pemerintah. Agar terlaksananya profesionalitas pelayan reje kampung, kordinasi antara unsur sarak opat dan masyarakat belum begitu maksimal dalam penyelenggaraanya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia

KATA PENGANTAR

Puji sukur kehadiran ALLAH SWT, berkat rahmat Nya lah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN REJE KAMPUNG BAGI MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik prodi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Yang paling istimewa, kepada Ayah ku H Abdussalam SE MM dan Mamakku tersayang Hj Salamiah Spd serta adek saya Musmira Rizki Salam yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir penulisan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussaini M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Drs. Tasrif Syam M,Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah S.Ip, M,Pd selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muahammadiyah Sumatra Utara .
5. Bapak Drs. Tasrif Syam M,Si selaku Dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberi waktu, arahan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nalil Khairiah S.Ip, M,Pd selaku Dosen pembimbing 2 yang telah banayak memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen – dosen dan seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Sutarman selaku Reje Kampung, Bapak Hasmadi selaku Banta, dan seluruh aparat perangkat Kampung Nunang Antara.
10. Untuk sahabat – sahabat saya Wiwin Ariga, Hendri bagus, Avonta, Hendra Teguh, Reza Jelon, Ivan Radasnyah, Devi mulyanto, Oja, dan sahabat lain

yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu , terima kasih telah banyak memberikan dukungannya.

11. Teman – teman mahasiswa/i ilmu Administrasi Negara dan seluruh teman fakultas fisip Stambuk 2013 lainnya yang sama sama lagi berjuang menulis skripsinya
12. Teman – teman kos yang telah memberikan doa dan dukugan.
13. Kepada keluarga besar penulis yang berada di Negeri atas awan tepatnya di Kota Takengon.

Akhirnya terima kasih yang tak terhingga kepada orang – orang yang tidak dapat penulis sampaikan disini. Semoga dukungan dan semangat yang anda berikan kelak akan terbalaskan di hari yang akan datang.

Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang didalam skripsi ini, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknis, redaksi maupun materinya. Seiring dengan hali itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Medan, 2 Desember 2017

Rahendra salam

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	5
D. Sistamika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS.....	8
A. Pengertian Implementasi.....	8
B. Penegertian Implementasi Kebijakan Publik.....	9
C. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	12

D. Pengertian Kebijakan.....	13
E. Penegertian Kebijakan Publik.....	14
F. Pengertian Qanun.....	16
G. Pengertian Pemerintahan Kampung.....	16
H. Pengertian Pelayanan Profesionalitas.....	20
I. Pengertian Masyarakat.....	22
J. Pengertian Sarana dan Prasarana.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Teknik Pengumpulan Data.....	26
a. Data Primer.....	26
b. Data Sekunder.....	27
C. Defenisi Konsep.....	27
D. Katagorisasi.....	29
E. Kerangka Konsep.....	29
F. Teknik Analisi Data.....	31

G. Narasumber.....	31
H. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	32
1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah.....	32
2. Gambaran Umum Kantor Reje Kampung Nunang Antara.....	33
3. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Penyajian Data.....	45
1. Deskripsi Narasumber.....	46
2. Deskripsi Hasil Wawancara.....	49
1. Adanya Tujuan Tertentu Yang Diikuti Atau Dilaksanakan.....	49
2. Adanya perubahan Keputusan Yang Mengarah Ke Masyarakat.....	53
3. Adanya prosedur Kerja Untuk Melaksanakan Suatu Kebijakan.....	57
4. Adanya Program – Program Kebijakan Profesionalitas Pelayanan.....	60
B. Analisis Hasil Wawancara.....	63
1. Adanya Tujuan Tertentu Yang Diikuti Atau Dilaksanakan.....	63
2. Adanya Perubahan Keputusan Yang Mengarah Ke Masyarakat.....	64
3. Adanya prosedur Kerja Untuk Melaksanakan Suatu Kebijakan.....	65
4. Adanya Program – Program Kebijakan Profesionalitas Pelayanan.....	66

BAB V PENUTUP.....68

A. Simpulan.....68

B. Saran70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keahsahan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hal tradisional yang di akui dan atau di bentuk dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di kehidupan ini masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat kearah yang semakin kritis. Hal itu di mungkinkan, karena semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibanya sebagai warga. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi

sebagai tuntunan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. Dalam kaitan itu (Rasyid 1997:11) mengemukakan bahwa : pemerintah modern, dengan kata lain, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat.

Pelayanan pemerintah sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, seperti telah berkembang luas pada tatanan organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan kompetisi global yang sangat ketat.

Dalam penerapan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang pemerintahan Kampung, pemerintah Kampung dijalankan oleh Reje (*kepala desa*) dan perangkat kampung. Perangkat kampung bertugas membantu Reje (*kepala desa*) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terdiri dari Banta (*seketaris*) dan perangkat kampung lain. Saat ini Reje (*kepala desa*) dan perangkat kampung di nilai masih belum bisa maksimal dalam memberikan profesionalitas pelayanan terhadap masyarakat. Dalam pembuatan surat-surat keterangan yang di perlukan masyarakat terkadang menimbulkan antrian karena sarana komputer di Kantor Reje hanya 1 (satu) unit. Dan mutu pelayanan belum memadainya ialah sarana dan prasarana lainnya yang menunjang pemerintah kampung.

Sarana dan prasarana yang belum memadai adalah bangunan, belum adanya bangunan pondok bersalin (polindes),selama ini seperti pos pelayanan pada (posyandu) masih menggunakan bangunan kantor pemerintah kampung, kendaraan dinas reje (sepeda motor) yang di anggap sudah tidak layak, balai taman pendidikan Al-qur'an (TPA) masih menggunakan bangunan masjid, dan satu lagi menjadi masalah belum meratanya pembangunan jalan seperti yang diharapkan masyarakat. Karena sarana dan prasarana sangat erat kaitanya dengan kualitas kerja pegawai,seharusnya kurangnya sarana-prasarana seperti ini tidak perlu terjadi mengingat wilayah strategis Kampung Nunang Antara termasuk wilayah perkotaan, yang letaknya tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.

Pemerintah Kampung merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peran aparatur pemerintah kampung sangat diharapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sesuai Qanun Nomor 4 Tahun 2011, yakni Pemerintah Kampung diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di pimpin oleh Reje kampung (kepala desa). Dalam lingkungan pemerintahan kampung, reje dan perangkat kampung sebagai pelakasa tugas pemerintah di kampung diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah kampung dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan

pembangunan. Pengaturan mengenai sebutan desa menjadi kampung serta kecamatan di atur dalam Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung.

Bedasarkan latar beakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka meningkatkan Profesionalitas pelayanan Reje Kampung bagi masyarakat kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah”

B. Rumusan masalah

Agar dapat mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji dalam suatu penelitian, maka dari indefikasi masalah dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

“Bagaimana implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2011 dalam rangka meningkatkan propesionalitas pelayanan Reje Kampung bagi masyakat Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan akan tidak mencapai sasaran sebagaimana yang di harapkan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui tentang Implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2011 dalam rangka meningkatkan profesionalitas pelayanan Reje Kampung bagi masyarakat Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis :

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan informasi, guna mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana implementasi Qanun Nomor 4 tahun 2011 dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi bagi masyarakat.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau dasar pengambilan keputusan/kebijakan bagi Sarak Opat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka di buat sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Berisikan tentang Pengertian Kebijakan, dan Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Pelayanan Publik, Pengertian Pelayanan Proposionalitas, Pengertian Pemerintahan Kampung, Pengertian Masyarakat, Pengertian Sarana dan Prasaran, Pengertian Qanun/Perda

BAB III : PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Berisikan Tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Key Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN**

BAB II

URAIAN TEORITIS

Teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang akan diteliti dari satu atau beberapa factor tertentu dalam masyarakat, gejala-gejala yang timbul di masyarakat itulah yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah yang harus segera dicari penyelesaian. Penyelesaian haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berdasarkan hal tersebut diatas dan didasarkan pada obyek penelitian yang akan diteliti maka peneliti menyimpulkan bahwa kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Pengertian Implementasi

Menurut Susilo (2007:174) Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Susilo (2007:174) menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Grindle (1998:7) implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, serta proses implementasi baru akan di mulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusunan dan dana telah siap dan telah di salurkan untuk mencapai sasaran.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan – kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pelaku dari semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun yang positif.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan. Ini adalah suatu aspek proses kebijakan, yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

B. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Winarno (2002:101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukuun dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja

bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan

Tangkilisan (2003:1) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legeslatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelulusan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Islamy (2002:102) kebanyakan kebijakan negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, atau sejenis dengan memerlukan implementasi untuk menampilkan hasil. Masalah implementasi kebijakan tersebut tidak terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Solihin (1991:45) implementasi kebijakan publik adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari satu kebijakan.

Dwijowijoto (2004:158) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat menjadi tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Edwards (1980:177) mengatakan implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakan tidak lebih dan tidak kurang. Tahapan – tahapan implementasi kebijakan meliputi masalah apa yang menjadi masalah publik yang perlu di pecahkan agar dapat dilaksanakan oleh unit – unit tertentu Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Menurut Edward (1980:178) mengindifikasikan 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik:

- a. *Communication* (komunikasi). Dalam pengimplementasikan di perlukanya komunikasi baik antara sesama pemuat kebijakan maupun yang di tujukan kebijakan.
- b. *Resources* (sumber daya). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. *Disposition* (sikap implementor). Implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasikanya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaanya.
- d. *Bireucratis* (struktur birokrasi). Meskipun sumber daya telah tersedia, implementor sudah tau apa yang harus di lakasanakan masi di hadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Dari kesimpulan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk memberlakukan hak berbentuk undang-undang peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

D. Pengertian Kebijakan

Kebijakan pada umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dibuat suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti.

Menurut Napitulu (2007:2) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri-sendiri.

Imron(2002:12) mengatakan, bahwa Kebijakan adalah sesuatu ketentuan pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berarti kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakat.

Sementara menurut Friedrich (2007:20) bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.

E. Pengertian Kebijakan publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera bedaskan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan public adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang di putuskan pemerintah untuk tidak di kerjakan.

Menurut Wiliam dun (2003:10) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyaknya berhubungan berserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai sesuatu keputusan tersendiri

Sementara Anderson (2002:29) mengatakan kebijaksanaan publik adalah jika kita mengetahui sesuatu tentang fakta-fakta yang membantu dalam bentuk kebijakan publik atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, sementara kita dapat memberikan sesuatu yang bersifat mengenai bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok atau pemerintah-pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal-hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri.

Selain itu Subarsono (2005:17) mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintahan.

Jika melihat defenisi di atas , maka dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik ialah :

- a. Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oeh pemilik wewenang (pemerintah)
- b. Berorentetasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang di timbulkan.
- c. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana.

Kebijakan selain dibuat tersendiri oleh lembaga Legeslatif maupun Eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerja sama antar Legislatif dan Esekutif. Di Indonesia produk kebijakan publik yang buat oleh kerja sama kedua lembaga ini adalah Undang-Undang ditingkat provensi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Tujuan bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang di putuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.

F. Pengertian Qanun (Perda)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

Qanun Kabupaten ialah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (perda) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

G. Pengertian Pemerintah Kampung

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 tahun 2011, pemerintah kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Sarak opat ialah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari Reje, imem, petue dan rakyat genap mupakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat martabat kampungnya.

Desa atau yang disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan hormati sebagai keistimewahan Aceh dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di pimpin oleh Reje.

Defenisi dari unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung yakni sarak opat dan perangkat kampung ialah sebagai berikut :

1) Reje (kepala desa)

Reje adalah kepala pemerintahan kampung

2) Imam kampung

Imam kampung adalah unsur sarak opat yang mempunyai tugas *muperlu sunet* dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan kepribadian, peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat.

3) Petue

Petue adalah unsur sarak opat yang mempunyai fungsi *musidik sasat* dengan tugas melakukan penelitian segala aspek kehidupan masyarakat.

4) Rakyat genap mupakat (RGM)

Rakyat genap mupakat adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda

dan perempuan pemuka adat dan cendikiawan yang ada dikampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung

5) Banta (sekretaris)

Perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung yang mempunyai tugas membantu Reje dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif.

Kedudukan, tugas, fungsi serta kewenangan pemerintah kampung adalah :

a. Kedudukan

kampung merupakan organisasi terendah yang berada dibawah kecamatan dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten.

b. Tugas

pemerintah kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan adat setiadat, memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan meningkatkan kualitas syariat islam serta memelihara kehormatan wilayah dan warganya.

c. Fungsi

untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam pasal 12, kampung mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (madebewind) serta segala urusan pemerintah lainnya yang berada dikampung.
2. pelaksanaan pembangunan untuk meingkatkan kesejahteraan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di kampung.
3. Peningkatan kualitas syariat islam.
4. Pembinaan dan fasilitasi dibidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan hak hak dasar masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6. Pelestarian adat dan adat istiadat di kampung.
7. Penyelesaian persengketaan dalam hal adanya pelanggaran syariat islam, perkara adat dan tindak pidana ringan.

d. Kewenangan

kewenangan kampung mencakup :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul kampung dan ketentuan adat dan adat istiadat
2. Kewenangan kabupaten yang di serahkan pengaturannya kepada kampung.
3. Tugas pembangunan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten.
4. Kewenangan lainnya oleh praturan perundang-undangan yang di serahkan kepada kampung.

H. Pengertian pelayanan profesionalitas

Pelayanan profesionalitas merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk memberikan pelayanan dalam suatu organisasi. Dalam penerapan pelayanan profesionalitas perlu di perhatikan hal-hal yang mendukung penerepan pelayanan profesionalitas di dalam suatu organisasi. Pada hakikatnya pelayanan profesionalitas dapat diartikan sebagai suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan profesionalitas merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standart kualitas dan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat.

Pelayanan profesionalitas menurut S.pamuaji (2000:57) sebagai perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan.

Menurut Dwijowijoto (2004:157) pelayanan profesionalitas yaitu, “Paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik”.

Siagian (2001:163) pelayanan profesionalitas adalah “Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.”

Sedarmayanti (2004:157) mengungkapkan bahwa “Pelayanan profesionalitas adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan”.

Pelayanan profesionalitas aparatur dalam hubungannya dengan organisasi publik menurut Atmosoeparto (2000:79) digambarkan sebagai, “Bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau disebut dengan istilah *resposivitas*”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan Profesionalitas adalah kecocokan (*fitness*) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic-competence*) dengan kebutuhan tugas (*ask - requirement*) Dan memberikan pelayanan profesionalitas sebagai individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika kepada yang membutuhkannya.

I. Pengertian Masyarakat

Menurut Wikipedia masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah dari masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah ialah saling berintraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasaran melalui warga-warganya dapat saling berintraksi. Biasanya anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Masyarakat dapat menunjuk pada masyarakat kecil, misalnya, masyarakat kelompok etnis Gayo di Aceh Tengah, atau suatu masyarakat yang lebih luas *nation state* seperti masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat seperti ini masyarakat berintraksi satu sama lain karna faktor budaya dan faktor agama, dan/atau etnis.

Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu adalah karna dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, di satu pihak ingin kerja sama, di pihak lain ia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia. Manusia mempunyai naluri (*instinct*) untuk hidup bersama orang lain secara harmonis. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun maupun mental yang sukar dipenuhinya seorang diri, maka ia berkerja sama untuk mencapai beberapa nilai (*value*). Ia perlu makan, minum, berkeluarga dan bergerak secara aman, dan sebagiannya. Untuk memenuhi dan keperluan-keperluan

dan kepentingan-kepentingan itu ia mengadakan hubungan dan berintraksi dengan orang lain dengan jalan mengorganisir bermacam-macam kebutuhan manusia. Misalnya, untuk mengajar kepentingan di bidang ekonomi didirikan asosiasi ekonomi seperti koperasi, perkumpulan perdagangan, perkumpulan dan nelayan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan di bidang spiritual diadakan perkumpulan agama, perkumpulan kebatinan dan sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan menambah pengetahuan didirikan sekolah-sekolah, kursus-kursun dan sebagainya.

Menurut Razak (2007:142) masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, mempunyai norma-norma, memiliki identitas yang sama, dan memiliki wilayah. Masyarakat bisa mengikuti lingkup yang besar, seperti masyarakat Indonesia, masyarakat Arab. Sedangkan dalam lingkup sempit, masyarakat dapat di temukan di desa, kota atau suku tertentu.

Menurut Siagian (2001:60) masyarakat adalah setiap orang pada umumnya terutama masyarakat yang “rentan” terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait.

Menurut para ahli , salah satunya Hoxley, masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat.

Menurut Dedi mulyanto (2011:22) masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*society means a system of ordered relations*).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi atau saling berhubungan menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat continue, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Sadar bahwa mereka adalah merupakan satu kesatuan.
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu dengan lainnya. (Soekanto, Suerjono, Jakarta : Rajawali Pers, 2012)

J. pengertian sarana dan prasarana

Menurut ketentuan umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2007. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat pindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah dan lain-lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:999,893). Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,pembangunan,proyek). Untuk lebih mudah membedakan keduanya. Sarana ditunjukkan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasna lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

Moleong dan Taylor (2000:3) “Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Tujuannya untuk menjelaskan obyek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena masalah yang ada, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi untuk memperoleh pengetahuan.

B. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah atau pembahasan. Sebagai sumber-sumber dasar yang terdiri dari bukti-bukti atau saksi utama dari kejadian (Fenomena) objek yang diteliti dan gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Yaitu diperoleh dari hasil wawancara langsung dari sumber asli (tanpa prantara). Teknik penarikan informan dengan berbagai

penilaian tertentu yang menurut peneliti di anggap layak untuk dijadikan sebagai sumber informasi/narasumber. Sebagai nara sumber dalam hal ini adalah Reje Kampung Nunang Antara, Imem kampung Nunang Antara, Petue Kampung Nunang Antara, Rakyat Genap Mupakat Kampung Nunang Antara, dan beberapa anggota masyarakat Kampung Nunang Antara sebagai penerima pelayanan proposional.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan di kumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan studi keputusan lainnya.

C. Defenisi Konsep

- a. Implementasi adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan. Ini adalah suatu aspek proses kebijakan, yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.
- b. Implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

- c. Kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.
- d. Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk di kerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak di kerjakan.
- e. Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.
- f. Pemerintahan kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pelayanan proposionalitas adalah pelayanan yang terbaik dan berkualitas yang diberikan pemerintah atau organisasi kepada pelanggan atau masyarakat guna terwujudnya kepuasan.
- h. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.
- j. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana ialah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu proses.

D. Katagorisasi

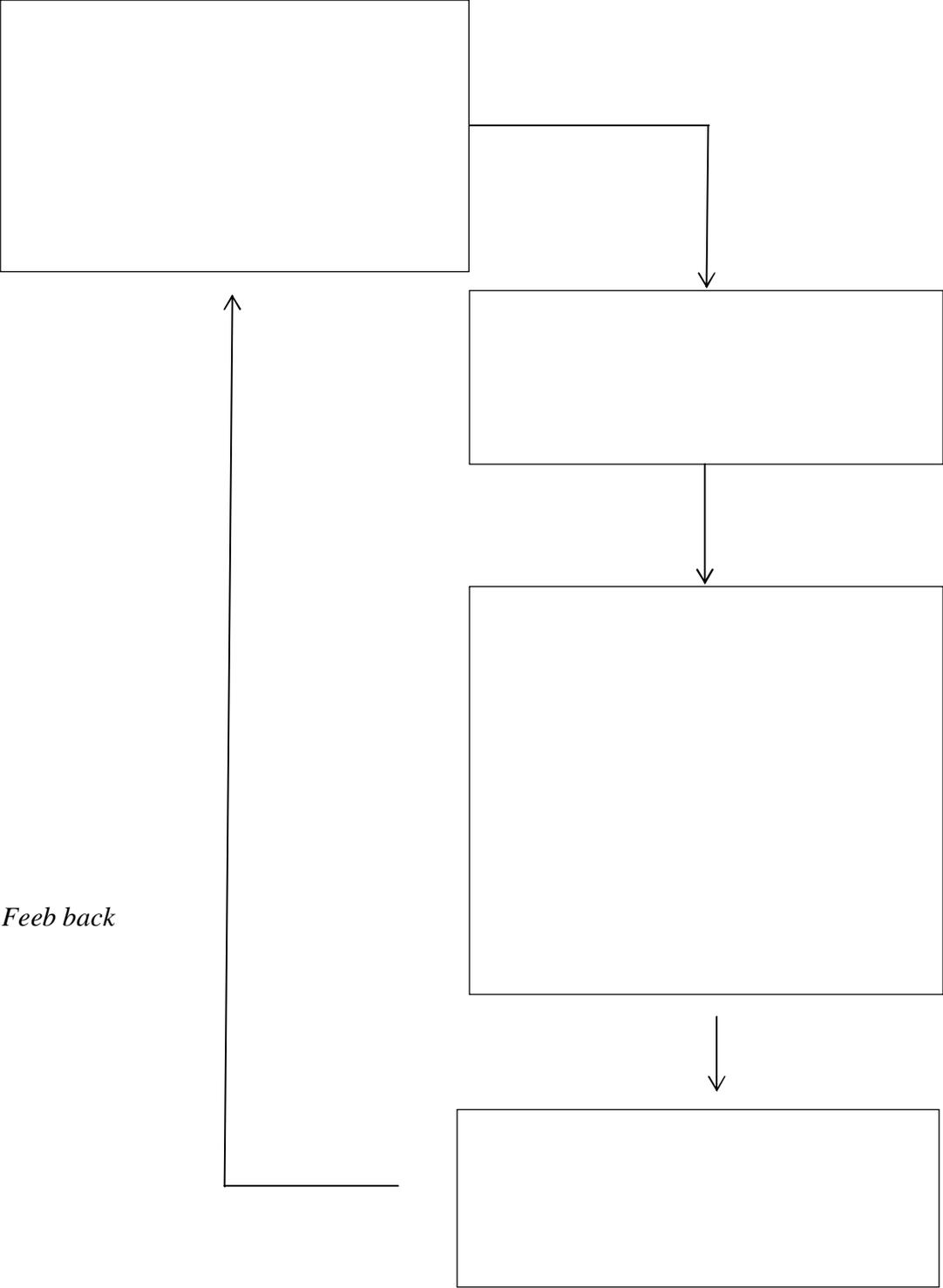
Katagorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intitusi, atau keteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengatur suatu variabel peneltian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori eneltian pendukung untuk analisis , dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya tujuan tertentu yang di ikuti atau di laksanakan.
- b. Adanya perubahan keputusan yang mengarah ke masyarakat.
- c. Adanya prosedur kerja untuk melaksanakan satu kebijakan.
- d. Adanya program-program kebijakan profesionalitas pelayanan.

E. Kerangka Konsep

Menurut Namawi (1995:43) bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis yang akan dicapai setelah dianalisis secara seksama berdasarkan persepsi yang di miliki.



Gambaran diatas menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pemerintahan Reje Kampung dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Proposional yang diberikan kepada masyarakat dimana hasil penelitian akan dideskripsikan atau dijelaskan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Moelong (2006:239) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola katagorisasi dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini,

Teknik penelitian yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian akan di interprestasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara yang di uraikan secara deskriptif.

G. Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah

a) 2 (dua) orang dari unsur Sarak Opat dan Perangkat kampung

Ø Bapak Sutarman selaku Reje (kepala desa) Kampung Nunang Antara

Ø Bapak Hasmadi selaku banta (sekretaris) Kampung Nunang Antara

b) 4 (empat) orang dari masyarakat penerima pelayananan

Ø Ibu Heny Maria SE (masyarakat)

Ø Bapak Agusfian (masyarakat)

Ø Ibu Sumarni Spd (masyarakat)

Ø Bapak Arifin S.Kes (masyarakat)

H. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 08.00 wib di kantor Reje Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Jl. Telege, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera yang berkordinat 4°22'14,42"-4°42'40,8" LU dan 96°15'23,6"-96°22'10,76" BT yang memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireun, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Nagan Raya, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Gayo. Selain itu terdapat pula suku-suku lainya, seperti suku Aceh, suku Jawa, suku Minang, suku Batak. 99 persen masyarakat Aceh Tengah beragama islam.

Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, sebutan berganti menjadi wilayah yang kemudian berubah lagi menjadi kabupaten. Aceh Tengah terdiri berdiri sebagai satuan administratif pada tanggal 14 April 1948 berdasarkan oendang-oendang Nomor 10 Tahun 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956. Wilayahnya meliputi 3 kawedanan, yaitu Kawedanan Takengon, Kawedanan Gayo Lues, dan Kawedanan Tanah Alas.

Sulitnya transportasi dan didukung aspirasi masyarakat, akhirnya pada tahun 1974 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974. Kemudian pada 7 Januari 2004, Kabupaten Aceh Tengah kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah tetap beribu kota di Takengon, sementara Kabupaten Bener Meriah beribu kota Simpang Tiga Redelong.

2. Gambaran umum Kantor Reje Kampung Nunang Antara

a. Visi

Terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kampung Nunang Antara

b. Misi

- 1) Melanjutkan peningkatan kualitas syariat islam
- 2) Melanjutkan pemantapan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan.
- 3) Melanjutkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan infrastruktur lainnya.

c. Kedudukan

Kampung merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah kecamatan dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten.

d. tugas

Pemerintah kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan istiadat, memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam serta memelihara kehormatan wilayah dan warganya.

e. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, kampung mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (madebwind) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di kampung.
2. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di kampung.
3. Peningkatan kualitas pelaksanaan syariat islam.
4. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradapan, sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan hak-hak dasar masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6. Pelestarian adat dan istiadat di kampung.
7. Penyelesaian persengketaan dalam hal adanya pelanggaran syariat islam, perkara adat dan tindak pidana ringan.

f. wewenang

1) Kewenangan kampung mencakup :

- Ø Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung dan ketentuan adat dan istiadat.

- Ø Kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung.
 - Ø Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten.
 - Ø Kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada kampung.
- 2) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh pemerintah kampung dan ditetapkan dalam qanun kampung
 - 3) Kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan peraturan bupati.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung

a. Uraian tentang tugas pokok dan fungsi aparat Pemerintah Kampung

1) Reje

Reje ialah kepala pemerintah kampung yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan pembinaan adat kampung berlandaskan syariat islam. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), reje mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaran pemerintahan kampung.
- b) Mengajukan rancangan qanun kampung.
- c) Menetapkan qanun kampung yang telah menddapt persetujuan bersama RGM.

- d) Menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APBK kampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama RGM.
- e) Menyusun RPJM kampung dan RKP kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung.
- f) Melaksanakan RPJ kampung dan RKP kampung.
- g) Membina perekonomian kampung dan menkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipasif.
- h) Memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan kampung.
- i) Mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Imem Kampung

Imem kampung adalah unsur penyelenggara pemerintah kampung di bidang keagamaan. Imem kampung mempunyai fungsi muperlu sunet, memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung dan membantu menyelesaikan sengketa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung, imem kampung mempunyai tugas :

- a) Menjalankan pendidikan keagamaan, pengajian dan pelaksanaan syariat islam

- b) Memimpin kegiatan peribadatan.
- c) Menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkenan dengan pemeliharaan dan kemakmuran masjid/mesrah dengan melaksanakan shalat fardhu serta perayaan hari-hari besar islam.
- d) Memberi nasehat dan pendapat berkenan dengan pelaksanaan syariat islam kepada reje baik diminta maupun tidak diminta.
- e) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenan dalam melaksanakan syariat islam bersama unsur sarak opat lainnya.
- f) Menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat islam.
- g) Memimpin pengelolaan baitul mal kampung, harta agama islam di kampung .
- h) Menjadi wali atas harta anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali.
- i) Mengawasi wali dari anak yatim dan/atau yatim piatu yang tidak mempunyai wali.
- j) Melaksanakan *sinte murip dan sinte mate*.

3) Petue

Petue adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung di bidang yudikatif.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan petue mempunyai fungsi :

- a) *Musidik sasat* sebagaimana dilaksanakan dengan bentuk penyidikan dan penelitian terhadap keadaan kampung dan masyarakat kampung untuk disampaikan kepada reje sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- b) Memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung sebagaimana dilaksanakan dalam bentuk memelihara dan melestarikan adat istiadat dan kearifan local yang diakui masyarakat kampung.
- c) Membantu menyelesaikan sengketa sebagaimana dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur sarak opat lainnya.

Dan dalam menyelenggarakan pemerintahan, petue juga mempunyai tugas di antara sebagai berikut :

- a) Memberikan saran dan pertimbangan kepada reje baik diminta maupun tidak.
- b) Memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat kepada reje untuk diputuskan.
- c) Melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penuntun atas sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenan dengan pelanggaran syariat islam dan adat istiadat untuk disampaikan kepada reje sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- d) Menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat.
- e) Melaksanakan tugas lain yang diminta oleh reje.

4) Rakyat genap mupakat (RGM)

Rakyat genap mupakat (RGM) adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung. Dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung, RGM mempunyai fungsi yaitu :

- a) Legalisasi sebagaimana dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan reje.
- b) Penganggaran sebagaimana dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun kampung tentang APBK kampung.
- c) Penyelesaian sengketa sebagaimana dilaksanakan dalam rangka musyawarah penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat bersama unsur sarak opat.

Rakyat genap mupakat (RGM) mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan kampung. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RGM mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a) Mengajukan dan mengubah qanun kampung bersama reje.
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBK kampung dan qanun kampung.
- c) Membentuk panitia pemilihan reje.
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian reje kepada bupati melalui camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama unsur sarakat opat lainnya.
- f) Menyerap, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

5) Perangkat kampung

Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) bertugas membantu reje dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang terdiri dari sekretariat kampung, pelaksana teknis dan perangkat kewilayahan.

a) Sekertariat kampung

Sekretariat kampung berpundudukan sebagai unsur staf pemerintah kampung yang mempunyai tugas membantu reje dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif yang di pimpin oleh banta. Dan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat kampung mempunyai fungsi diantaranya sebagaiberikut :

- Ø Menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintahan kampung.
- Ø Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBK kampung.
- Ø Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik kampung

- Ø Menyusun rancangan qanun kampung tentang APBK kampung dan perubahan APBK kampung
- Ø Menyusun rancangan keputusan reje tentang pelaksanaan APBK kampung
- Ø Membantu reje dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penghulu, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan.
- Ø Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas perangkat pemerintahan kampung lainnya.
- Ø Melakukan pembinaan administrasi dan perangkat pemerintah kampung lainnya
- Ø Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh reje sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Pelaksanaan teknis

pelaksanaann teknis kampung dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, asal usul, adat dan istiadat setempat yang mempunyai tugas membantu reje dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pelaksana teknis kampung sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- Ø Biden
- Ø Harie
- Ø Pawang laut
- Ø Pawang deret
- Ø Pawang uer

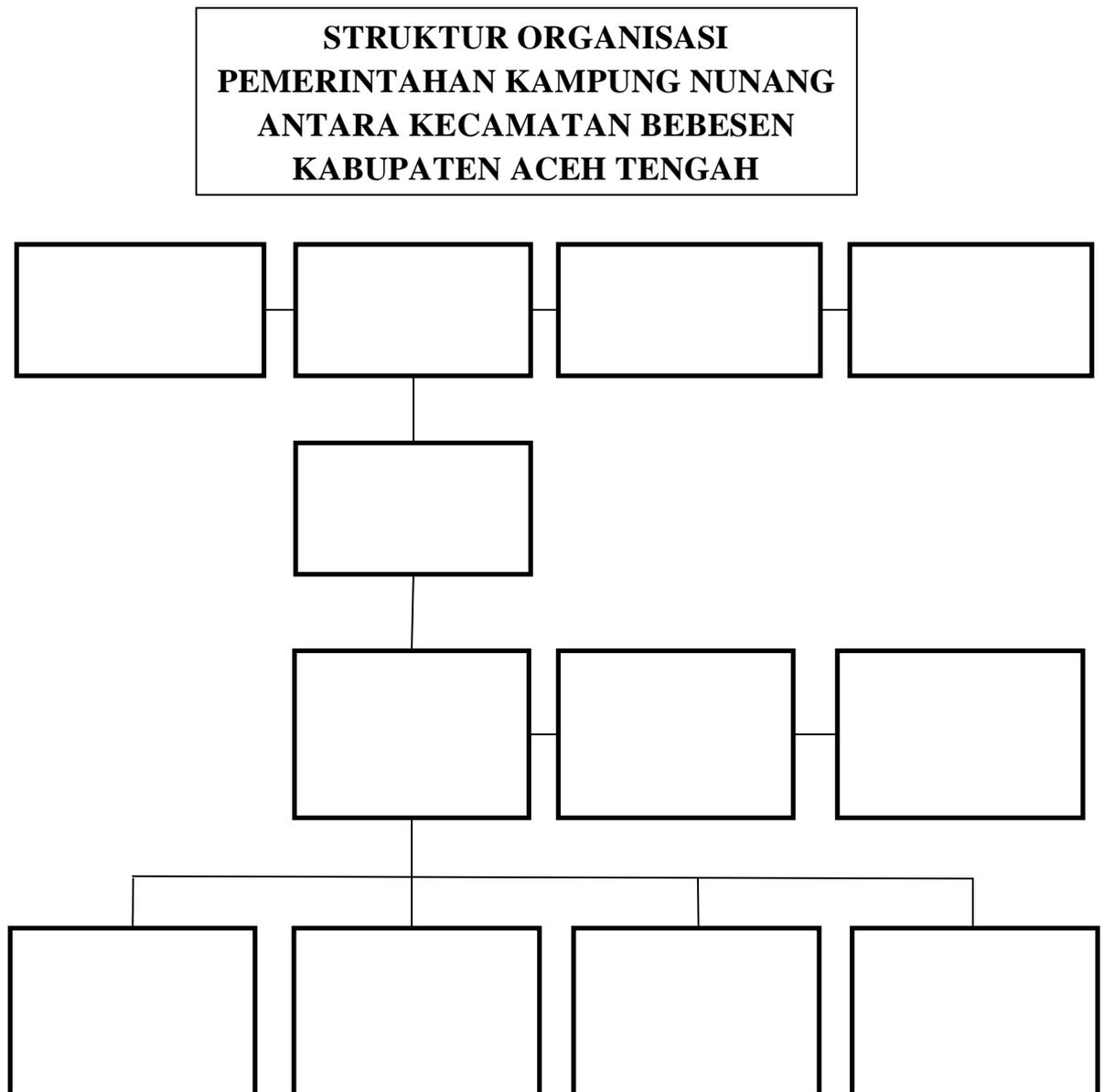
- Ø Pengulu uten
- Ø Kejurun belang/pengulu rerak
- Ø Urusen industry dan perdagangan
- Ø Urusen budaya dan parawisata
- Ø Perangkat kewilayahan

Perangkat kewilayahan terdiri dari dusun-dusun. Dusun berkedudukan sebagai perangkat kampung unsur kewilayahan yang di pimpin oleh penghulu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada reje melalui banta. Uraian tugas, fungsi dan tata kerja banta, kepala urusan, pelaksana teknis dan pengulu diatur dengan paraturan bupati.

6) Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung

Dapat dilihat dari gambar 3.1 struktur organisasi kampung Nunang Antara dibawah kedudukan sarak opat adalah setara , mereka memiliki hubungan saling kerja sama atau mengontrol untuk pelaksanaan tugas dibantu oleh perangkat kampung lainnya yaitu urusan ekonomi dan pembangangunan, urusan administrasi umum, urusan pemerintah kesara dan penghulu.

Gambar 3.1 struktur organisasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Birokrasi pada dasarnya merupakan alat pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dalam posisi demikian, maka tugas birokrasi adalah merealisasikan setiap kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pencapaian kepentingan masyarakat. Menurut peneliti kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Nunang Antara dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan bentuk sebuah peningkatan profesionalitas pelayanan kepada masyarakat, hal ini diketahui dengan adanya pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Kebijakan Qanun tersebut dalam meningkatkan mutu profesionalitas pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalitas pelayanan tidak terlepas dari pelayanan, salah satunya adalah pelayanan administrasi, pelayanan administrasi di Kampung Nunang Antara meliputi surat kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), surat kematian, surat izin usaha, surat perpindahan penduduk, surat keterangan pembuatan KTP baru dan surat-surat keterangan lainnya. Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi ini, Pemerintah Kampung telah berupaya meningkatkan profesionalitas pelayanan kepada masyarakat dengan bekerja sama Reje Kampung, perangkat kampung sampai kepada penghulu (dusun) guna meningkatkan sarana dan prasarana penunjang

pemerintahan dan dalam penyelenggaraannya terdapat kendala dan hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM).

Dalam hal ini sarana dan prasarana penunjang pemerintahan sangat perlu untuk kelancaran profesionalitas pelayanan khususnya terhadap pelayanan administrasi, maka Pemerintah Kampung setiap tahunnya menambah Sarana dan penunjang pemerintahan melalui dana alokasi dan Kampung (ADK), karena sarana dan prasarana penunjang pemerintahan sangat mempengaruhi dalam meningkatkan profesionalitas pelayanan dan dalam Kebijakan Qanun disebutkan pemerintah kampung diuntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan prasarana penunjang pemerintahan di Kampung Nunang Antara sudah dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat dan terbukti adanya peningkatan di setiap bulannya guna terciptanya mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kampung Nunang Antara.

1. Deskripsi Narasumber

Berdasarkan hasil wawancara langsung dilapangan peneliti kepada narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data – data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban – jawaban atas pernyataan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan qanun nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan

kampung juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan – penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki – laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan sebagai berikut :

TABEL 3.1

DISTRIBUSI NARASUMBER MENURUT JENIS KELAMIN

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	persentase
1	Laki – laki	4	71.5 %
2	perempuan	2	28.5 %
	jumlah	6	100 %

Sumber : Data wawancara tahun 2017

Berdasarkan table 3.1 tersebut bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki – laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 71.5 %, sedangkan jenis kelamin perempuan frekuensi 2 orang atau 28.5 %.

b. Distribusi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30 – 39 tahun, umur 40 – 49 tahun , dan umur 50 – 59 tahun. Pada table 3.2 akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing – masing katagori umur sebagai berikut :

TABEL 3.2

DISTRIBUSI NARASUMBER MENURUT UMUR

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	30 – 39 Tahun	2	33.1 %
2	40 – 49 Tahun	2	33.1 %
3	50 – 59 Tahun	2	33.1 %
		6	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

c. Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 katagori yaitu pegawai negri sipil, pegawai honorer, dan wiraswasta. Pada tabel akan dijelaskan frekuensi untuk masing – masing katagori sebagai berikut.

TABEL 3.3**DISTRIBUSI NARASUMBER MENURUT PEKERJAAN**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negri Sipil	4	50 %
2	Pegawai Honorer	1	25 %
3	Wiraswasta	1	25 %
	Jumlah	6	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

2. Diskripsi Hasil Wawancara

1. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

Tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan adalah peningkatan profesionalitas pelayanan reje kampung dan pemerataan pembangunan infrastruktur lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara penelitian kepada Bapak Sutarman selaku Reje (kepala desa) Kampung Nunang Antara pada hari rabu tanggal 15 februari 2017 pukul 10.30 di Kantor Reje Kampung Nunang Antara, dalam pelaksanaan Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang Pemerintah Kampung dirasa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan amanat Qanun tersebut sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kampung dalam penerepan Kebijakan Qanun Pemerintah Kampung yaitu:

- a) Melanjutkan peningkatan kualitas syariat Islam.

- b) Melanjutkan pemantapan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan
- c) Melanjutkan peningkatan profesionalitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan infrastruktur lainnya.

Disamping itu penerapan Kebijakan Qanun sudah jauh pada tingkat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala dan hambatan seperti masyarakat belum sepenuhnya mengerti akan hal-hal yang dilarang maupun hal-hal yang tidak dilarang dan kedepannya agar pelaksanaan Kebijakan Qanun ini lebih baik lagi ialah di perlukannya peningkatan di semua bidang.

Selain itu menurut bapak Hasmadi Selaku Banta (sekretaris) Kampung Nunang Antara pada hari rabu tanggal 15 february 2017 pukul 11.00 di Kantor Reje Kampung Nunang Antara, menyatakan bahwa pelaksanaan Qanun tersebut dinilai cukup baik karena telah sesuai dengan amanat Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung tersebut meskipun terlihat dilapangan ada beberapa kendala. Yang menjadi visi misi Pemerintah Kampung dalam melaksanakan pemerintahan sama seperti yang sebelumnya dikatakan oleh Reje Kampung Simpang Empat yaitu :

- a) Melanjutkan peningkatan kualitas syariat islam.
- b) Melanjutkan pemantapan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan.
- c) Melanjutkan peningkatan profesionalitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan infrastruktur lainnya.

Dilihat dari penerapan Qanun tentang Pemerintahan Kampung ini dinilai sudah berjalan dalam jangka meningkatkan profesionalitas masyarakat, peningkatan profesionalitas pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan serata fasilitas yang dimiliki masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari beberapa waktu kebelakang tidak ada kendala yang besar dalam penerapan Qanun ini, adapun yang menjadi kendala yang menghambat, hanya sebagian kecil saja yaitu dalam hal peningkatan kualitas syariat islam dan yang hasilnya masih bisa ditangani di tingkat kampung, tidak sampai ke tingkat mukim. Dan yang menjadi saran dalam pelaksanaan Kebijakan Qanun ini agar kedepannya kesejahteraan para penyelenggara Pemerintah Kampung bisa lebih dipertimbangkan lagi.

Menurut Ibu Heny Maria SE selaku masyarakat Kampung Nunang Antara yang di wawancarai pada hari kamis 16 februari 2017 pukul 14.00, menyatakan bahwa pelaksanaan Kebijakan Qanun dinilai baik, namun masih belum maksimal. Menurut beliau sejak diterapkannya Kebijakan Qanun pelayanan publik jadi lebih baik dibandingkan sebelum di terapkannya Qanun tersebut. Saran beliau adalah agar pemerintah Kampung lebih baik lagi, agar kedepan pelayanan publik bisa lebih ditingkatkan lagi dan perangkat kampung dilibatkan dalam aktifitas di kampung.

Selain itu hasil wawancara peneliti terhadap bapak Agusfian selaku masyarakat Kampung Nunang Antara pada hari kamis tanggal 16 februari 2017 pukul 15.00, menyatakan bahwa pelaksanaan Kebijakan Qanun yang diterapkan oleh Pemerintah Kampung dinilai baik, akan tetapi alangkah baiknya jika ada pembenahan

di Kampung Nunang Antara ini agar masyarakat dapat memahami apa saja kebijakan yang berjalan dalam kampung ini. Sejauh ini penerapan dinilai belum sempurna karena adanya perubahan kebijakan kampung oleh aparat kampung yang baru, perbedaan yang dirasakan yang sekarang sudah ada tapi kurangnya informasi kepada masyarakat, saran beliau kedepan yang terpenting adalah meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sumarni Spd selaku masyarakat Nunang Antara pada hari kamis 16 februari 2017 pukul 16.00 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Qanun tentang Pemerintahan Kampung oleh aparat yang melaksanakan tugas sebagai Pemerintah Kampung dinilainya sudah baik, penerapan Kebijakan Qanun ini sudah baik dan beliau sangat berharap agar kedepan bisa lebih baik lagi. Perbedaan yang dirasakan setelah diterapkannya Kebijakan Qanun ini ada, dan saran untuk Pemerintah Kampung kedepan ialah penyampaian informasi kepada masyarakat bisa lebih jelas lagi agar masyarakat tidak salah jalan, meningkatkan profesionalitas pelayanan lebih ditingkatkan lagi agar semua segi pemerintahan berjalan dengan baik.

Adapun pengutipan hasil wawancara peneliti kepada bapak Arifin S.Kes selaku warga masyarakat Nunang Antara pada hari kamis tanggal 16 februari 2017 pukul 20.00 , menyatak pelaksanaan Kebijakan Qanun tersebut sejauh ini sudah tahap peningkatan kual an bahwaitas pelayanan atau dalam membenahan pemberian pelayanan publik. Adapapun perbedaan yang dirasakan sekarang ialah hampir semua aturan yang berlaku berlandasan atas adat istiadat dan adanya peningkatan dalam

Pemerintahan Kampung, dan saran yang disampaikan ialah agar kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat dapat ditingkatkan lagi karena sebagai aparatur pemerintahan kampung sudah sewajibnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2. Adanya perubahan keputusan yang mengarah ke masyarakat

Keputusan yang mengarah ke perubahan yang terjadi di masyarakat adalah meningkatnya kepercayaan terhadap reje kampung walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih kurang percaya terhadap pemerintahan kampung

Berdasarkan hasil wawancara penelitian terhadap Bapak Sutarman selaku Reje (kepala desa) Kampung Nunang Antara pada hari rabu tanggal 15 februari 2017 pukul 10.30 di Kantor Reje Kampung Nunang Antara, menyatakan keputusan yang mengarah ke perubahan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik, mengingat Kampung Nunang Antara mendapat prestasi dari Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan perubahan – perubahan yang terjadi untuk masyarakat salah satunya perubahan pelayanan administrasinya. Prosedur dalam pelayanan administrasi dengan langsung menemui banta (sekertaris) dan menyampaikan keperluan. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perubahan untuk masyarakat salah satunya pelayanan administrasi, pemerintah memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM perangkat pemerintahan kampung dan juga dengan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi, dan yang

menjadi kendala dalam memberikan perubahan tersebut kepada masyarakat adalah kurangnya SDM dalam hal ini. Saran untuk peningkatan kualitas pelayanan kedepannya agar sarana dan prasarana penunjang pemerintahan bisa lebih memadai lagi dan kualitas SDM juga bisa lebih baik lagi.

Selain itu menurut bapak Hasmadi Selaku Banta (sekretaris) Kampung Nunang Antara pada hari rabu tanggal 15 february 2017 pukul 11.00 di Kantor Reje Kampung Nunang Antara, menyatakan bahwa keputusan yang mengarah perubahan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik. Prosedur dalam pemberian perubahan salah satunya pelayanan administrasi dengan langsung menemui Banta (sekretaris). Upaya dalam meningkatkan perubahan terhadap masyarakat salah satunya kualitas pelayanan administrasi ialah adanya kerja sama yang baik Reje maupun perangkat kampung sampai ketingkat pengulu (dusun) dan kerja sama TNI/POLRI, dan sejauh ini upaya peningkatan pelayanan administrasi dengan sudah adanya penunjang pelayanan administrasi yang bisa dikatakan memadai tetapi masih ada sedikit kekurangan juga kendala yang dirasakan belum ada. Saran untuk peningkatan kualitas pelayanan kedepannya dengan lebih meningkatkan kesejahteraan perangkat kampung meningkat besarnya tanggung jawab perangkat kampung dalam pelaksanaan tugasnya.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Heny Maria SE selaku masyarakat Kampung Nunang Antara pada hari kamis 16 february 2017 pukul 14.00, menyatakan bahwa keputusan yang mengarah perubahan kepada masyarakat saat

ini sudah cukup baik, begitu juga upaya yang dilakukan sudah adanya fasilitas dan pengurusan surat-surat bisa menjadi lebih cepat lebih baik dari sebelumnya. Adapun kendala dan hambatan dalam pengurusan surat – surat ialah manajemen waktu yang begitu kurang maksimal dan pengesahan surat yang kurang tepat waktu. Saran kedepannya untuk peningkatan kualitas pelayanan agar kedepan jam kerja lebih di maksimalkan lagi dengan aturan yang ada.

Lain halnya dengan hasil wawancara peneliti terhadap bapak Agusfian selaku masyarakat Kampung Nunang Antara pada hari kamis tanggal 16 februari 2017 pukul 15.00 , yang menyatakan bahwa keputusan yang mengarah keperubahan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik, akan tetapi perlu ditingkatkan kembali agar lebih baik, upaya yang dilakukan pemerintahan kampung dalam meningkatkan keputusan yang mengarah ke perubahan salah satunya perubahan pelayanan administrasi adalah dengan adanya pendekatan – pendekatan kepada masyarakat dan tidak mengharapkan imbalan atau insentif. Dan yang menjadi kendala dan hambatan dalam pengurusan surat – surat ialah kurangnya tenaga pekerja dibidang operator komputer pada pelayanan kepada masyarakat sehingga terkadang pembuatan surat – surat menjadi tertunda. Saran kedepannya hanya agar kedepan bisa lebih baik lagi.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh ibu Sumarni Spd selaku masyarakat Nunang Antara pada hari kamis 16 februari 2017 pukul 16.00, yang menyatakan bahwa keputusan yang mengarah keperubahan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik, upaya yang dilakukan pemerintah kampung dalam meningkatkan

perubahan salah satunya pelayanan administrasi adalah mengajak masyarakat berkerja sama dalam semua bidang, melayanani masyarakat dengan ramah tamah, menjelaskan kepada masyarakat agar apa yang masyarakat butuhkan berjalan dengan lancar serta tidak mengharapkan imbalan sekecil apapun karena aparatur perangkat kampung dituntut untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara dengan tulus ikhlas. Yang menjadi kendala dan hambatan dalam pengurusan surat – surat dan kurangnya SDM aparatur kampung. Saran kedepannya adalah penambahan operator komputer pada kantor Reje kampung Nunang Antara ini agar kedepan bisa lebih baik lagi dari sekarang dan masyarakatpun merasa puas dengan pelayanan yang baik dan benar.

Menurut bapak Arifin S.Kes Selaku warga masyarakat Nunang Antara pada hari kamis tanggal 16 februari 2017 pukul 20.00, menyatakan bahwa keputusan yang mengarah keperubahan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik tetapi akan lebih baik ditingkatkan lagi. Upaya yang dilakukan adalah telah menambah sarana dan prasarana penunjang pemerintahan kampung walaupun belum sampai 90 %. Kendala dan hambatan yang kerap terjadi dalam pengurusan surat – surat di kantor Reje Kampung Nunang Antara ialah kurangnya SDM aparatur pemerintahan yang berakibat kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan juga sering memakan waktu yang lama. Sarannya adalah kualitas SDM yang perlu ditingkatkan lagi guna meningkatkan kualitas pelayanannya.

3. Adanya prosedur kerja untuk melaksanakan satu kebijakan.

Suatu kegiatan untuk pelaksanaan berdasarkan qanun nomor 4 tentang pemerintahan kampung adalah dengan terlaksananya prosedur kerja.

Adapun prosedur kerja pemerintahan kampung adalah

1. melaksanakan kordinasi antar sarak opat, yang dilakukan oleh Reje, Imen, Petue, dan Rakyat Genap Mupakat, agar prosedur tersebut terlaksana.
2. Kerja sama yang terkait dengan pelaksanaan prosedur.
3. Melakukan pengawasan terhadap masing – masing program, yang dilakukan oleh Rakyat Genap Mupakat (RGM).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian terhadap Bapak Sutarman selaku Reje (kepala desa) Kampung Nunang Antara pada hari rabu tanggal 15 february 2017 pukul 10.30 di Kantor Reje Kampung Nunang Antara, menyatakan bahwa prosedur kerja untuk melaksanakan suatu kebijakan sekarang ini dinilai sudah baik, dilihat dari kelengkapan yang dimiliki kantor Reje Kampung Nunang Antara sudah sesuai prosedur ,walaupun hanya saja masih ada sarana dan prasarana yang kurang memadai, yaitu komputer hanya 1 unit sehingga masyarakat yang berurusan menimbulkan keantrian, belum adanya pondok bersalin (polindes) , balai taman pendidikan Al – Qur'an (TPA) masih menggunakan bangunan masjid, kendraan dinas Reje yang dirasa tidak layak, sehingga dampak sarana prasarana tersebut dirasakan

oleh masyarakat dan prosedur ini sudah dilakukan kerja sama antara sarak opat dan pemerintahan. Dalam upaya ini ada juga masyarakat yang mengetahui melalui rapat – rapat internal yang melibatkan sebahagian masyarakat. Jika ada masalah yang dilakukan masyarakat maka RGM (Rakyat Genap Mupakat) akan memprosesnya.

Hal yang hampir sama juga dinyatakan oleh Bapak Hasmadi Selaku Banta (sekertaris) Kampung Nunang Antara pada hari rabu tanggal 15 february 2017 pukul 11.00 di Kantor Reje Kampung Nunang Antara, menyatakan bahwa prosedur kerja untuk melaksanakan suatu kebijakan sekarang ini dinilai sudah baik karena sudah sudah sesuai prosedur. Upaya yang dilakukan pemerintahan kampung agar masyarakat mengetahui prosedur tersebut sudah berjalan dengan baik. Dan masyarakat sudah banyak mengetahui tentang prosedur pelayanan profesionalitas melalui sosialisasi. Serta jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka akan diproses oleh RGM tersebut, agar proses pelayanan tersebut sesuai prosedur dan berjalan dengan baik dan maksimal.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Heny Maria SE selaku masyarakat Kampung Nunang Antara pada hari kamis 16 february 2017 pukul 14.00, menyatakan bahwa Prosedur itu sudah di jalankan pemerintahan kampung. dan Prosedur profesionalitas pelayanan sudah banyak di ketahui masyarakat walaupun ada yang tidak mengetahuinya. Masyarakat mengetahuinya melalui pendekatan – pendekatan yang dilakukan oleh pemerintahan kampung tersebut. Jika masyarakat melakukan pelanggaran maka akan diserahkan ke RGM tersebut.

Selain itu hasil wawancara terhadap bapak Agusfian selaku masyarakat Kampung Nunang Antara pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 pukul 15.00, menyatakan bahwa prosedur yang dijalankan saat ini masih kurang berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi, sebagian prosedur ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui, karena sebahagian masyarakat masih kurangnya mendapat informasi – informasi dari pemerintahan kampung. Dan yang menjadi kendala kurangnya pemberitahuan – pemberitahuan terhadap masyarakat tentang prosedur yang di jalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sumarni Spd selaku masyarakat Nunang Antara pada hari Kamis 16 Februari 2017 pukul 16.00, menyatakan bahwa prosedur yang di jalankan sudah cukup baik, dan prosedur pelayanan yang dijalankan sudah banyak masyarakat yang mengetahui walaupun tidak semua. Dengan adanya informasi kepada masyarakat melalui alat komunikasi komputer dan yang lainnya serta upaya yang dilakukan pemerintah kampung dalam meningkatkan prosedur profesionalitas pelayanan. Dan saat ini pemerintah kampung sudah sesuai prosedur.

Hal senada juga dinyatakan bapak Arifin S.Kes selaku warga masyarakat Nunang Antara pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 pukul 20.00 dikediamannya. prosedur yang di jalankan sudah cukup baik, untuk saat ini prosedur – prosedur kerja yang di lakukan pemerintah kampung, sudah banyak masyarakat yang mengetahui. Banyak dari mereka mengetahui hal tersebut dari mencari taunya sendiri dan bersosialisasi terhadap pemerintah kampung itu sendiri. Walaupun sebagian tidak

mau tau atas apa yang terjadi di kampungnya sendiri. Kendala dan hambatan untuk saat ini saya rasa tidak ada, karna menurut saya pemerintah kampung sudah bekerja secara maksimal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dijalankan pemerintah kampung sudah maksimal dan sesuai dengan Nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintah kampung yang dilaksanakan oleh rakyat genap mupakat (RGM).

4. Adanya program –program kebijakan profesionalitas pelayanan.

Program – program kebijakan profesionalitas pelayanan adalah program yang dibuat oleh pemerintah kampung saat ini yang sedang di jalankan secara profesionalitas salah satunya pembangunan masjid dan perbaikan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian terhadap Bapak Sutarman selaku Reje (kepala desa) Kampung Nunang Antara pada hari rabu tanggal 15 februari 2017 pukul 10.30 di Kantor Reje Kampung Nunang Antara menyatakan bahwa untuk saat ini program – program kebijakan profesionalitas pelayanan sudah sangat bagus, adapun program yang saat ini di jalankan adalah pembangunan masjid Al amin yang dulunya hanya Meunasah (mushola). Dan sarana dan prasarananya sudah cukup baik, yang saat ini pembangunan tersebut masih berjalan . Sarana dan prasarana saat ini sudah sedikit mencapai target , karna saat ini masjid tersebut sudah bisa digunakan oleh masyarakat.

Hal senada yang dikatakan bapak Hasmadi Selaku Banta (sekretaris) Kampung Nunang Antara pada hari rabu tanggal 15 februari 2017 pukul 11.00 di Kantor Reje Kampung Nunang Antara menyatakan bahwa program – program kebijakan profesionalitas pelayanan saat ini sudah meningkat cukup baik, karna saat ini sudah cukup banyak program yang di jalankan salah satunya pembagunan masjid dan perbaikan jalan. Sarana dan prasarana pun sudah dilaksanakan kendatipun belum sepenuhnya terlaksana. Target saat ini sarana dan prasarananya sudah berjalan karna masih banyak masyarakat yang tidak mau partisipasi dalam melaksanakan program – program yang di targetkan.

Selain itu hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Heny Maria SE selaku masyarakat Kampung Nunang Antara pada hari kamis 16 februari 2017 pukul 14.00 , menyatakan bahwa program – proram di kampung Nunang Antara untuk saat ini sudah sedikit maksimal baik dari segi jalan dan bangunan, program di jalankan hanya baru sekitar 60 – 70 % saja. Sarana dan prasarananya pelaksanaannya cukup lambat , semoga kedepannya pelaksanaan program mencapai target sepenuhnya.

Menurut bapak Agusfian selaku masyarakat Kampung Nunang Antara pada hari kamis tanggal 16 februari 2017 pukul 15.00, menyatakan bahwa pelaksanan profesionalitas pelayanan dikampung Nunang Antara masih perlu di tingkatkan lagi. Karna banyak program yang dijalankan hanya setengah jalan saja. Sarana yang menunjang untuk saat ini masih sangat minim, Saat ini program belum sempurna

karna banyak sarana dan prasarana yang masih kekurangan salah satunya banyak jalan yang belubang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sumarni Spd selaku masyarakat Nunang Antara pada hari Kamis 16 Februari 2017 pukul 16.00, menyatakan bahwa program-program yang meningkatkan profesionalitas pelayanan pada saat ini sudah berjalan dengan baik, banyak program yang meningkatkan profesionalitas salah satunya untuk saat ini pembangunan masjid. Sarana dan prasarana saat ini masih banyak kekurangannya, dan sarana prasarana saat ini masih berjalan.

Selain itu hasil wawancara peneliti kepada bapak Arifin S.Kes selaku warga masyarakat Nunang Antara pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 pukul 20.00 menyatakan bahwa pelaksanaan program-program untuk meningkatkan profesionalitas sudah berjalan dengan baik salah satunya pembangunan masjid dan jalan raya. Program tersebut sudah berjalan sesuai target hanya saja masih ada kekurangannya. Sarana dan prasarana saat ini untuk menunjang program tersebut sudah terlaksana. Sehingga target sarana prasarana tersebut tiap tahunnya sudah jauh meningkat, Semoga kedepannya tercapai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program untuk peningkatan profesionalitas hanya masih difokuskan kepada pembangunan masjid untuk mempermudah masyarakat melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya masyarakat

B. Analisis hasil wawancara

1. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

Tujuan yang diikuti atau dilaksanakan merupakan suatu proses perencanaan yang dibuat oleh pemerintahan kampung untuk mencapai sasaran yang dapat di implementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Dalam penelitian ini pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan peraturan daerah atau Qanun yang di terapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemerintahan kampung yang profesional di desa Nunang antara kecamatan bebesen kabupaten Aceh tengah masih kurang maksimal hal itu di sebabkan oleh masih minimnya sarana dan prasaran, dan SDM. Faktor yang menyebabkan kurangnya profesionalitas, karna kurangnya sosaliasasi pemerintah tingkat dua dan anggaran yang sangat kurang.

Dengan ini 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik:

- *Communication* (komunikasi). Dalam pengimplementasikan di perlukanya komunikasi baik antara sesama pemuat kebijakan maupun yang di tujukan kebijakan.

- *Resources* (sumber daya). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- *Disposition* (sikap implementor). Implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasikanya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
- *Bireucratis* (struktur birokrasi). Meskipun sumber daya telah tersedia, implementor sudah tau apa yang harus di lakasanakan masi di hadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

2. Adanya perubahan keputusan yang mengarah ke masyarakat

Setiap keputusan yang mengarah keputusan ke perubahan yang terjadi kemasyarakat banyak minimbulkan pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif, pengaruh positif yang dimaksud adalah pengaruh yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan salah satunya pelayanan administrasinya. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah sebagai dampak yang tidak memberikan pengetahuan terhadap masyarakatnya sehingga banyak yang tidak mengetahuinya.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh , maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Qanun nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka meningkatkan profesionalitas pelayan reje kampung bagi masyarakat sudah di implementasikan. Keputusan yang mengarah ke perubahan yang terjadi untuk

masyarakat sudah memeberikan fasilitas yang baik salah satunya pelayanan administrasi. Dengan adanya pelayanan seperti ini masyarakat sudah sangat mudah melakukan pelayanan administrasi secara profesional yang dilakukan reje kampung dan pemerintahannya.

Terkait dengan pembahasan ini, penulis menyimpulkan bahwa keputusan yang mengarah perubahan yang terjadi untuk masyarakat sudah cukup baik, karna dapat membuat masyakat puas untuk pelayanannya salah satunya pelayanan administrasinya. Akan tetapi belum sepenuhnya masyakat puas karna banyak yang harus dibenahi oleh pemerintahan kampung salah satunya kendala hambatan dalam pengurusan surat – surat ialah managemen waktu yang begitu kurang maksimal dan pengesahan surat yang kurang tepat waktu.

3. Adanya prosedur kerja untuk memperoleh suatu kebijakan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh , maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Qanun nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka meningkatkan profesionalitas pelayan reje kampung bagi masyarakat Setiap prosedur kerja untu memperoleh suatu kebijakan sudah sesuai prosedur walaupun ada sebagian kecil yang belum, tetapi sudah dijalankan secara profesionalitas dan banyak masyarat yang mentahai walau pun ada sebahagian yang tidak mau tahu menahu soal prosedur kerja ini.

Prosedur kerja dinilai sudah baik dilihat dari kelengkapan yang dimiliki kantor Reje Kampung Nunang Antara sudah sesuai prosedur , dan prosedur ini sudah dilakukan kerja sama antara sarak opat dan pemerintahan kampung terutama. Dalam upaya ini ada juga masyarakat yang mengetahui melalui rapat – rapat internal yang melibatkan sebahagian masyarakat.

Terkait dengan pembahasan ini , penulis menyimpulkan bahwa intraksi pemerintah kampung dengan masyakat tentang prosedur kerja sudah berjalan dengan lancar , sehingga dampak dari prosedur kerja ini sudah nambah jelas walaupun hanya masih berjalan , yang sebentar lagi akan mencapai target.

4. Adanya program – program kebijakan untuk profesionalitas pelayanan

Program yang dilaksanakan adalah suatu rencana yang sudah mempunyai tujuan dan sudah sasaran kedepannya dari komitmen dalam sebuah organisasi pemerintahan kampung. Penerapan program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan daerah, akan tetapi masih belum mencapai target.

Adapun program kebijakan profesionalitas pelayanan yang dilaksanakan pemerintahan kampung saat ini adalah pembangun masjid yang dulunya hanya mushola agar masyarakat nyaman melakukan ibadah, dan namun saat ini sarana dan prasarana masih berjalan karna kurangnya dana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah cukup puas karena program yang di buat sudah dijalankan dengan profesionalitas walaupun masih belum selesai . Target tahun 2020 masjid tersebut akan mencapai target. Pengimplementasian kebijakan Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka meningkatkan profesionalitas pelayanan reje kampung bagi masyarakat kampung nunang antara berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : Kebijakan Qanun Nomor 4 Tentang Pemerintahan Kampung dalam rangka meningkatkan profesionalitas pelayanan Reje Kampung bagi masyarakat Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung dalam rangka meningkatkan profesionalitas pelayanan sudah diikuti dan terlaksana dengan baik.
2. Profesionalitas pelayanan Reje Kampung bagi masyarakat kampung Nunang antara kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat mengarah pada perubahan tapi masih belum maksimal karna dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM)
3. Profesionalitas Pelayanan Pemerintahan Kampung sudah terlaksana karna adanya prosedur kerja oleh sarak opat yaitu *reje, imem kampung, petue dan rakyat genap mupakat* (RGM) mereka sudah melakukan kordinasi dengan baik.
4. Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung sudah terimplemtasi karna program – program kebijakan

profesionalitas pelayanan sudah terlaksana, namun belum maksimal dikarenakan pembangunan yang belum merata yang disebabkan oleh kurangnya SDM dan biaya anggaran.

5. Implementasi kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung terhadap pengaturan saran dan prasarana penunjang pemerintahan sudah terlaksana dengan baik dengan adanya peningkatan disetiap tahunnya.

B. Saran

1. Dalam penerapan Kebijakan perlunya ditingkatkan lagi sumber daya manusia agar apa yang di atur dalam Kebijakan dapat terlaksana dengan baik.
2. Dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan, pemerintah kampung harus lebih meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia (SDM).
3. Dalam prosedur kerja untuk memperoleh kebijakan, pemerintah kampung agar lebih bisa mengatur sarana dan prasarana yang lebih dibutuhkan masyarakat, seperti sarana dalam Kantor Reje lebih di tingkatkan lagi.
4. Dalam melaksanakan program – program kebijakan profesionalitas pelayanan kedepan agar pemerintah kampung lebih terbuka dalam melaksanakan program – program guna terciptanya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan anggaran – anggaran yang kurang selama ini.
5. Kepada masyarakat Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen apabila ada suatu program, masyarakat harus mendukung program tersebut dan ikut partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James, 2002: *Analisis Kebijakan Publik*. Caps Yogyakarta
- Atmosoeprapto, Kisdarto, 2000: *Kepemimpinan efektif dan manajemen efisien* ,
elex media Jakarta
- Dedi mulyanto ,2011: *Masyarakat dan Kebudayaan*. Ultimus, Jakarta
- Dwijowijoto , Ryan Nugroho, 2003: *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan
Evaluasi*. PT Elex Media Koputindo . Jakarta.
- Dye, Thomas. R, 1976: *Understanding Public Policy*. Rosdakarya. Bandung
- Edward, 1980 : *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik* caps. Jakarta.
- Friedrich, Carl 2007: *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung
- Imron, Ali, 2002; *Kebijaksanaan Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Islamy, Irfan, 2002: *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. PT Bumi Aksara
Jakarta
- Namawi, Hindari 1995: *Metode Penelitian Sosial* Gajah Mada University Press.
Yogyakarta
- Napitulu , Pimin, 2007 . *Kebijakan Publik* PT . Alumni Jakarta
- Nugroho. 2003: *Pelayanan Publik*. Mandar Maju, Bandung.
- Razak. 2007: *Demokrasi Ham dan Masyarakat*. Prenada, Jakarta
- Sedarmayati. 2004: *Tugas dan Pengembangan Profesi Untuk Meraih Keberhasilan*.
Bina Aksara, Jakarta
- S.Pamudji. 2000: *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta

- Solichin 1991: *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Bumi Rieneka Cipta. Jakarta.
- Subarsono . 2005: *Analisa Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Jakarta
- Susilo, Hartandi, 2007: *Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini*. Aksara Baru Jakarta
- Siagan P, Sondang, 2001: *Manajemen SDM*. Bumi Aksara, Jakarta
- Tangkilisan , 2003: *Kebijakan Publik Yang Membumi* . YPAPI, Yogyakarta
- Wahab , Solihin 1991: *Metode Peneltian Sosial*. Aksara Jakarta
- William Dun, 2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung
- Winarno, Budi, 2002: *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Prindo
Yogyakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar
Sarana dan Prasarana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Praturan Perundang-
Undang
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung

INTERNET

<http://anitahidayantii.blogspot.co.id/2014/09/defenisi-dan-ruang-lingkup-sarana-dan.html>

<http://datafilecom.blogspot.co.id/2010/03/makalah-tenatang-qanun.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/qanun>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tengah

<http://000gayo.blogspot.co.id/2010/06/sejarah-aceh-tengah.html>

<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=25128>

<http://mefitahudriyah.blogspot.co.id/2012/10/pelayananhtml>.

<https://thelastthree.wordpress.com/tag/definisi-profesionalisme-menurut-para-ahli/>

http://sumberfkip.blogspot.co.id/2015/09/Pengertian-Profesionalisme_84.html

<http://wboeky.blogspot.co.id/2013/03/profesionalitas-dalam-pelayanan.html>

Daftar wawancara penelitian skripsi

**Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN
BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nama : Sutarman

Usia : 55 tahun

Jenis kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : Reje (kepala desa)

Alamat : Kampung Nunang Antara

Agama : Islam

A. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

1. Bagaimana upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan?
2. Apakah standar pelayanan di kampung Nunang Antara sudah sesuai tujuan ?
3. Apakah kinerja pegawai terhadap pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik?
4. Apa saja yang menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan ?

B. Adanya perubahan keputusan yang mengarah ke masyarakat.

1. Bagaimana keputusan pelaksanaan pelayanan profesionalitas di kampung Nunang antara ini ?
2. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan administrasi bagi masyarakat?
3. Apakah upaya Reje Kampung untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan itu sudah dilakukan?
4. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan?

C. Adanya prosedur kerja untuk memperoleh satu kebijakan.

1. Bagaimana prosedur itu di jalankan ?
2. Apakah prosedur profesionalitas pelayanan sudah diketahui masyarakat ?
3. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui prosedur profesionalitas pelayanan tersebut?
4. Apa yang menjadi kendala dan hambatan pelaksanaan pelayanan tersebut?

D. Adanya program – program kebijakan profesionalitas pelayanan.

1. Apakah pelaksanaan pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan program yang di jalankan ?

2. Apa yang menjadi visi dan misi pemerintah kampung dalam penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung?
3. Sudah sejauh mana penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung ini dijalankan?
4. Dalam pelaksanaan Kebijakan Qanun Pemerintahan Kampung apakah yang menjadi kendala dan hambatan dalam penerapannya?
5. Bagaiman saran untuk pemerintah kampung kedepannya agar lebih baik lagi?

JAWABAN

A.

1. pelaksanaan Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang Pemerintah Kampung dirasa sudah berjalan dengan baik.
2. Ya,(1) karna sudah melanjutkan peningkatan kualitas syariat Islam.
 - (2) Melanjutkan pemantapan sarana dan prasarana penunjang pemerintahan
 - (3) Melanjutkan peningkatan profesionalitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan infrastruktur lainnya.
3. Dalam penerepannya sudah pada tingkat penigkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Dalam pelaksanaanya ada beberapa kendala dan hambatan seperti masyarakat belum sepenuhnya mengerti akan hal-hal yang dilarang maupun hal-hal yang tidak dilarang.

B.

1. menyatakan keputusan profesionalitas yang mengarah keperubahan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik
2. meningkatkan perubahan – perubahan yang terjadi untuk masyarakat salah satunya perubahan pelayanan administrasinya.

3. Iya karna pemerintah sudah memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM perangkat pemerintahan kampung dan juga dengan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi.
4. kurangnya SDM dalam hal ini.

C.

1. Sudah, dilihat dari kelengkapan yang dimiliki kantor Reje Kampung Nunang Antara sudah sesuai prosedur.
2. Sudah.
3. Dalam upaya ini ada juga masyarakat yang mengetahui melalui rapat – rapat internal yang melibatkan sebahagian masyarakat.
4. Kendala sudah mulai membaik.

D.

1. Sudah , karna program – program kebijakan profesionalitas pelayanan sudah sangat bagus,
2. Saat ini masih fokus ke pembangunan masjid
3. Program – program kebijakan profesionalitas pelayanan sudah sangat bagus.
4. Hambatannya tidak ada.
5. Sarana dan prasarannya sudah hampir terlaksana.

Daftar wawancara penelitian skripsi

**Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN
BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nama : Hasmadi

Usia : 53 tahun

Jenis kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : Banta (kepala desa)

Alamat : Kampung Nunang Antara

Agama : Islam

A. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

5. Bagaimana upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan?
6. Apakah standar pelayanan di kampung Nunang Antara sudah sesuai tujuan ?
7. Apakah kinerja pegawai terhadap pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik?
8. Apa saja yang menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan ?

B. Adanya perubahan keputusan yang mengarah ke masyarakat.

5. Bagaimana keputusan pelaksanaan pelayanan profesionalitas di kampung Nunang antara ini ?
6. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan administrasi bagi masyarakat?
7. Apakah upaya Reje Kampung untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan itu sudah dilakukan?
8. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan?

C. Adanya prosedur kerja untuk memperoleh satu kebijakan.

5. Bagaimana prosedur itu di jalankan ?
6. Apakah prosedur profesionalitas pelayanan sudah diketahui masyarakat ?
7. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui prosedur profesionalitas pelayanan tersebut?
8. Apa yang menjadi kendala dan hambatan pelaksanaan pelayanan tersebut?

D. Adanya program – program kebijakan profesionalitas pelayanan.

6. Apakah pelaksanaan pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan program yang di jalankan ?

7. Apa yang menjadi visi dan misi pemerintah kampung dalam penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung?
8. Sudah sejauh mana penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung ini dijalankan?
9. Dalam pelaksanaan Kebijakan Qanun Pemerintahan Kampung apakah yang menjadi kendala dan hambatan dalam penerapannya?
10. Bagaiman saran untuk pemerintah kampung kedepannya agar lebih baik lagi?

JAWABAN

A.

1. Pelaksanaan Qanun tersebut dinilai cukup baik karena telah sesuai dengan amanat Qanun Nomor 4 tahun 2011.
2. Dilihat dari penerapan Qanun tentang Pemerintahan Kampung ini dinilai sudah berjalan dalam jangka meningkatkan profesionalitas masyarakat.
3. Baik.
4. Dari beberapa waktu kebelakang tidak ada kendala yang besar dalam penerapan Qanun ini

B.

1. Menyatakan keputusan yang mengarah perubahan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik.
2. Mendapat prestasi dari Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan perubahan – perubahan yang terjadi untuk masyarakat salah satunya perubahan pelayanan administrasinya.
3. Sudah .
4. Kendala dalam memberikan perubahan tersebut kepada masyarakat adalah kurangnya SDM dalam hal ini.

C.

1. Prosedur kerja untuk melaksanakan suatu kebijakan sekarang ini dinilai sudah baik karena sudah sesuai prosedur.
2. Sudah
3. Mengetahui tentang prosedur pelayanan profesionalitas melalui sosialisasi.
4. Kendalanya hanya sedikit.

D.

1. Sudah, karena peningkatan cukup membaik.
2. Saat ini hanya menjalani program pembangunan masjid saja.
3. Sudah berjalan dengan baik.
4. Saranya agar lebih maju lagi.

Daftar wawancara penelitian skripsi

**Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN
BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nama : Heny Maria SE

Usia : 45 tahun

Jenis kelamin : perempuan

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Kampung Nunang Antara

Agama : Islam

A. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

9. Bagaimana upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan?
10. Apakah standar pelayanan di kampung Nunang Antara sudah sesuai tujuan ?
11. Apakah kinerja pegawai terhadap pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik?
12. Apa saja yang menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan ?

B. Adanya keputusan perubahan yang terjadi untuk masyarakat.

9. Bagaimana keputusan pelaksanaan pelayanan profesionalitas di kampung Nunang antara ini ?
10. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan administrasi bagi masyarakat?
11. Apakah upaya Reje Kampung untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan itu sudah dilakukan?
12. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan?

C. Adanya prosedur kerja untuk memperoleh satu kebijakan.

9. Bagaimana prosedur itu di jalankan ?
10. Apakah prosedur profesionalitas pelayanan sudah diketahui masyarakat ?
11. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui prosedur profesionalitas pelayanan tersebut?
12. Apa yang menjadi kendala dan hambatan pelaksanaan pelayanan tersebut?

D. Adanya program – program kebijakan profesionalitas pelayanan.

11. Apakah pelaksanaan pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan program yang di jalankan ?

12. Apa yang menjadi visi dan misi pemerintah kampung dalam penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung?
13. Sudah sejauh mana penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung ini dijalankan?
14. Dalam pelaksanaan Kebijakan Qanun Pemerintahan Kampung apakah yang menjadi kendala dan hambatan dalam penerapannya?
15. Bagaiman saran untuk pemerintah kampung kedepannya agar lebih baik lagi?

JAWABAN

A.

1. Qanun pelayanan publik jadi lebih baik dibandingkan sebelum di terapkannya Qanun tersebut.
2. Sudah walaupun masih berjalan.
3. Iya, baik.
4. Kendalanya hanya sedikit.

B.

1. Keputusan yang mengarah perubahan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik.
2. Upaya yang dilakukan sudah adanya fasilitas dan pengurusan surat-surat bisa menjadi lebih cepat lebih baik dari sebelumnya.
3. Iya sudah.
4. Managemen waktu yang begitu kurang maksimal dan pengesahan surat yang kurang tepat waktu.

C.

1. Prosedur itu sudah di jalankan pemerintahan kampung.
2. Prosedur profesionalitas pelayanan sudah banyak di ketahui masyarakat walaupun ada yang tidak mengetahuinya.

3. Melalui sosialisasi dari pemerintahan kampung.
4. Tidak ada.

D.

1. Program – proram di kampung Nunang Antara untuk saat ini sudah sedikit maksimal baik dari segi jalan dan bangunan.
2. Saat ini hanya pembangunan masjid
3. Sudah sangat bagus pembangunan saat ini.
4. Sarana dan prasarananya pelaksanaannya cukup lambat
5. Agar pemerintah lebih baik lagi.

Daftar wawancara penelitian skripsi

**Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN
BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nama : Agusfian

Usia : 38 tahun

Jenis kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : Kampung Nunang Antara

Agama : Islam

A. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

13. Bagaimana upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan?
14. Apakah standar pelayanan di kampung Nunang Antara sudah sesuai tujuan ?
15. Apakah kinerja pegawai terhadap pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik?
16. Apa saja yang menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan ?

B. Adanya perubahan keputusan yang mengarah ke masyarakat.

13. Bagaimana keputusan pelaksanaan pelayanan profesionalitas di kampung Nunang antara ini ?
14. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan administrasi bagi masyarakat?
15. Apakah upaya Reje Kampung untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan itu sudah dilakukan?
16. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan?

C. Adanya prosedur kerja untuk memperoleh satu kebijakan.

13. Bagaimana prosedur itu di jalankan ?
14. Apakah prosedur profesionalitas pelayanan sudah diketahui masyarakat ?
15. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui prosedur profesionalitas pelayanan tersebut?
16. Apa yang menjadi kendala dan hambatan pelaksanaan pelayanan tersebut?

D. Adanya program – program kebijakan profesionalitas pelayanan.

16. Apakah pelaksanaan pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan program yang di jalankan ?

17. Apa yang menjadi visi dan misi pemerintah kampung dalam penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung?
18. Sudah sejauh mana penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung ini dijalankan?
19. Dalam pelaksanaan Kebijakan Qanun Pemerintahan Kampung apakah yang menjadi kendala dan hambatan dalam penerapannya?
20. Bagaiman saran untuk pemerintah kampung kedepannya agar lebih baik lagi?

JAWABAN

A.

1. Pelaksanaan Kebijakan Qanun yang diterapkan oleh Pemerintah Kampung dinilai baik.
2. Sudah
3. Alangkah baiknya jika ada pembenahan di Kampung Nunang Antara ini agar masyarakat dapat memahami apa saja kebijakan yang berjalan dalam kampung ini.
4. kedepan yang terpenting adalah miningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
5. Kedepan yang terpenting adalah miningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

B.

1. Bahwa keputusan yang mengarah perubahan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik.
2. Perlu ditingkatkan kembali agar lebih baik.
3. Dengan adanya pendekatan – pendekatan kepada masyarakat dan tidak mengharapkan imbalan atau insentif.
4. Dalam pengurusan surat – surat ialah kurangnya tenaga pekerja dibidang operator komputer pada pelayanan.

C.

1. Bahwa prosedur yang dijalankan saat ini masih kurang berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi.
2. Hanya sedikit.
3. Melalui rapat – rapat antara masyarakat dan pemerintah.
4. Kendala kurangnya kordinasi antar masyarakat.

D.

1. Iya , perlu ditingkatkan lagi.
2. Saat ini hanya pembangunan masjid saja yg terlihat.
3. Sudah hampir terlaksana.
4. Krangnya apresiasi warga.
5. Agar menjadi lebih baik lagi.

Daftar wawancara penelitian skripsi

**Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN
BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nama : Sumarni Spd

Usia : 28 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Guru Swasta

Alamat : Kampung Nunang Antara

Agama : Islam

A. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

17. Bagaimana upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan?
18. Apakah standar pelayanan di kampung Nunang Antara sudah sesuai tujuan ?
19. Apakah kinerja pegawai terhadap pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik?
20. Apa saja yang menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan ?

B. Adanya perubahan keputusan yang mengarah ke masyarakat.

17. Bagaimana keputusan pelaksanaan pelayanan profesionalitas di kampung Nunang antara ini ?
18. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan administrasi bagi masyarakat?
19. Apakah upaya Reje Kampung untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan itu sudah dilakukan?
20. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan?

C. Adanya prosedur kerja untuk memperoleh satu kebijakan.

17. Bagaimana prosedur itu di jalankan ?
18. Apakah prosedur profesionalitas pelayanan sudah diketahui masyarakat ?
19. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui prosedur profesionalitas pelayanan tersebut?
20. Apa yang menjadi kendala dan hambatan pelaksanaan pelayanan tersebut?

D. Adanya program – program kebijakan profesionalitas pelayanan.

21. Apakah pelaksanaan pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan program yang di jalankan ?

22. Apa yang menjadi visi dan misi pemerintah kampung dalam penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung?
23. Sudah sejauh mana penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung ini dijalankan?
24. Dalam pelaksanaan Kebijakan Qanun Pemerintahan Kampung apakah yang menjadi kendala dan hambatan dalam penerapannya?
25. Bagaiman saran untuk pemerintah kampung kedepannya agar lebih baik lagi?

JAWABAN

A.

1. Pemerintah Kampung dinilainya sudah baik.
2. Sudah lumayan.
3. Iya, sudah.
4. Kurangnya sosialisasi.

B.

1. Bahwa keputusan yang mengarah perubahan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik.
2. Mengajak masyarakat berkerja sama dalam semua bidang.
3. Menjelaskan kepada masyarakat agar apa yang masyarakat butuhkan berjalan dengan lancar.
4. Kurangnya SDM aparatur kampung.

C.

1. Prosedur yang di jalankan sudah cukup baik.
2. Prosedur pelayanan yang dijalankan sudah banyak masyarakat yang mengetahui walaupun tidak semua.
3. Melalui rapat – rapat .
4. Saat ini tidak masalah.

D.

1. Sudah berjalan dengan baik.
2. Meningkatkan profesionalitas salah satunya untuk saat ini pembangunan masjid.
3. Sudah bagus.
4. Tidak ada
5. Agara kedepannya lebi baik lagi.

Daftar wawancara penelitian skripsi

**Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN
BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nama : Arifin S.kes

Usia : 44 tahun

Jenis kelamin : Laki – laki

Pekerjaan : dosen

Alamat : Kampung Nunang Antara

Agama : Islam

A. Adanya tujuan tertentu yang diikuti atau dilaksanakan.

21. Bagaimana upaya pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan?
22. Apakah standar pelayanan di kampung Nunang Antara sudah sesuai tujuan ?
23. Apakah kinerja pegawai terhadap pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik?
24. Apa saja yang menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan ?

B. Adanya perubahan keputusan yang mengarah ke masyarakat.

21. Bagaimana keputusan pelaksanaan pelayanan profesionalitas di kampung Nunang antara ini ?
22. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan administrasi bagi masyarakat?
23. Apakah upaya Reje Kampung untuk meningkatkan profesionalitas pelayanan itu sudah dilakukan?
24. Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas profesionalitas pelayanan?

C. Adanya prosedur kerja untuk memperoleh satu kebijakan.

21. Bagaimana prosedur itu di jalankan ?
22. Apakah prosedur profesionalitas pelayanan sudah diketahui masyarakat ?
23. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui prosedur profesionalitas pelayanan tersebut?
24. Apa yang menjadi kendala dan hambatan pelaksanaan pelayanan tersebut?

D. Adanya program – program kebijakan profesionalitas pelayanan.

26. Apakah pelaksanaan pelayanan sudah memberikan pelayanan sesuai dengan program yang di jalankan ?

27. Apa yang menjadi visi dan misi pemerintah kampung dalam penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung?
28. Sudah sejauh mana penerepan kebijakan Qanun pemerintahan kampung ini dijalankan?
29. Dalam pelaksanaan Kebijakan Qanun Pemerintahan Kampung apakah yang menjadi kendala dan hambatan dalam penerapannya?
30. Bagaiman saran untuk pemerintah kampung kedepannya agar lebih baik lagi?

JAWABAN

A.

1. Sudah baik.
2. Sudah.
3. Ya saat ini sudah dilakukan dengan baik.
4. Kendalanya saya rasa tidak ada.

B.

1. Bahwa keputusan yang mengarah perubahan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik.
2. Upaya yang dilakukan adalah telah menambah sarana dan prasarana penunjang pemerintahan kampung walaupun belum sampai 90 %.
3. Sudah
4. Kendala saat ini sudah cukup baik.

C.

1. Prosedur yang dijalankan sudah cukup baik.
2. Sudah banyak masyarakat yang mengetahui.
3. Melalui rapat – rapat .
4. Tidak ada.

D.

1. Ya sudah.
2. Saat ini hanya pembangunan saja
3. Sudah hampir selesai target.
4. Tidak ada.
5. Semoga kedepannya lebih baik lagi.